

POLISI KEMBALI PERIKSA SYL

Rumah di Kertanegara Disewa Alex Tirta

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya menyebut rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan disewa atas nama Tirta Juwana Darmadji alias Alex Tirta dari pemilik rumah atas nama E. Alex Tirta menyewa rumah tersebut seharga kisaran Rp 650 juta pertahun.

Sebelumnya polisi menggeledah rumah di Jalan Kertanegara terkait kasus pemerasan yang diduga melibatkan pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). "Pemilik rumah Kertanegara nomor 46 adalah E dan yang menyewa rumah dari E adalah Alex Tirta," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (31/10).

Saat disinggung terkait kemungkinan Firli pernah bertemu SYL di rumah tersebut, Ade Safri menjelaskan hal tersebut merupakan materi penyidikan. "Ya itu materi penyidikan ya. Tapi yang jelas upaya penyidikan yang dilakukan tim penyidik gabungan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan tim penyidik gabungan," kata Ade. Terkait kasus tersebut, Ditreskrimsus

Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Riksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus PMJ (lantai 21 Gedung Promoter) dan di Bareskrim Polri, Selasa (31/10).

Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya terdapat lima orang saksi. "Pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap saksi pegawai KPK RI (Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI) dan 4 (empat) orang saksi lainnya," katanya.

Untuk Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI sudah selesai namun empat orang saksi lainnya masih berlangsung. Kemudian pukul 10.00 WIB di Bareskrim Polri dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap saksi Kombes Pol IA (Kapolrestabes Semarang). "Pukul 14.00 WIB dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap saksi SYL (eks Mentan RI) dan saksi M Hatta (eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI)," jelasnya. (Ant/Has)-f



KR-Antara/Aji Styawan

PAKET KIRIMAN PMI TERTAHAN: Petugas melakukan pendataan paket barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di gudang penimbunan sementara PT Trans Benua Logistik di Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/10/2023). Berdasarkan data Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang melakukan proses impor barang kiriman PMI ada sekitar 70 kontainer berisi barang-barang PMI dari berbagai negara seperti Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Jepang, Dubai, dan Qatar mengalami penundaan pengiriman kepada keluarga PMI di seluruh wilayah Indonesia akibat adanya aturan Permenkeu dan Permendag tentang impor barang dari luar negeri yang diperdagangkan.

CALON PANGLIMA TNI

Presiden Tunjuk KSAD yang Baru Dilantik

JAKARTA (KR) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, lembaga yang dipimpinnya telah menerima surat presiden (surpres) tentang penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.

"Saya akan mengumumkan calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat," kata Puan di Jakarta, Selasa (31/10).

Dengan adanya surpres tersebut, Jenderal Agus Subiyanto yang baru saja dilantik sebagai KSAD pada Rabu (25/10)

menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun, akan menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Di sela-sela Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR II Tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Puan Maharani menyebutkan, Jenderal Agus Subiyanto diusulkan sebagai calon Panglima TNI untuk meng-

gantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan pensiun. Sesuai aturan undang-undang, menurut Puan, presiden harus menyampaikan usulan nama Panglima TNI baru kepada DPR.

"Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun yang sesuai dengan aturannya, yaitu pada 26 November, sesuai hari kelahiran beliau," jelas Puan.

Sesuai Undang-Undang TNI, presiden harus mengusulkan calon pengganti Panglima TNI kepada DPR di luar masa reses, kurang lebih mekanisme itu adalah 20 hari sejak surpres tersebut diterima pimpinan DPR. Menurut Puan, DPR segera menindaklanjuti usul

pergantian Panglima TNI tersebut.

Puan mengatakan, DPR akan memprosesnya sesuai mekanisme yang ada yaitu melalui tahapan *fit and proper test* kepada Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. "DPR akan memulai proses mekanisme di DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon panglima tersebut, sesuai aturan dan mekanisme yang ada di DPR," kata Puan.

Ia berharap mekanisme pergantian Panglima TNI dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga Panglima TNI yang akan datang bisa berjalan baik dan tidak akan ada kekosongan. (Ant)-f

Karhutla Lawu Tak Pengaruhi Wisata

MAGETAN (KR) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Magetan mencatat kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Plaosan, Magetan, Jawa Timur, tidak terpengaruh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama hampir sebulan ini.

"Jumlah kunjungan masih normal. Saat akhir pekan Sabtu dan Minggu, sekitar 10.000 pengunjung," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata Disparbud Magetan Eka Raditya di Magetan, Selasa (31/10).

Menurutnya, sesuai data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Magetan, periode 1-21 Oktober 2023 jumlah wisatawan ke Telaga Sarangan mencapai 45.690 pengunjung. Padahal beberapa hari belakangan, karhutla di Gunung Lawu dilaporkan terjadi lagi, meski tidak sebesar sebelumnya.

Meski tidak terpengaruh, pihaknya meminta para pengelola tempat wisata di lereng Gunung Lawu untuk waspada. Tak hanya di Telaga Sarangan, namun juga objek wisata lain yang dikelola swasta.

Mojosemi Park, objek wisata swasta juga tidak sepi pengunjung meski karhutla terjadi di Gunung Lawu. "Alhamdulillah, jumlah wisatawan masih wajar," kata petugas Marketing Mojosemi Park Nanang Sedayu.

Karhutla di Gunung Lawu yang cukup besar tercatat mulanya terjadi pada akhir September 2023 hingga pertengahan Oktober 2023.

Data BPBD Jatim mencatat total area terdampak karhutla di Gunung Lawu hingga pertengahan Oktober 2023 mencapai 2.185 hektare, meliputi wilayah Kabupaten Ngawi seluas 1.300 ha, Kabupaten Magetan 700 ha, dan Kabupaten Karanganyar 185 ha. (Ant/San)-f

SIKAP DIAM DK PBB ATAS GAZA

Menu RI Tak Habis Pikir

JAKARTA (KR) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengaku heran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) diam saja melihat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza. Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot di Jakarta, Selasa (31/10).

"Posisi Indonesia sangat jelas. Masalah kemanusiaan harus menjadi fokus kita semua saat ini," kata Retno usai pertemuan. "Dan Indonesia tidak akan mundur dalam membela keadilan dan kemanusiaan rakyat Palestina," sambungnya.

Sejak serangan 7 Oktober 2023, DK PBB gagal menghasilkan resolusi mengenai krisis Israel-Palestina. Ada empat rancangan resolusi yang diajukan, tetapi gagal diadopsi karena veto sejumlah anggota tetap dewan tersebut, yang terdiri Amerika Serikat, Prancis, Inggris, China, dan Rusia.

Rancangan resolusi yang diusulkan

AS mengenai 'jeda kemanusiaan' gagal disahkan karena diveto China dan Rusia, sedangkan draf Rusia tentang 'gencatan senjata kemanusiaan' tidak dapat diadopsi karena kurang mendapatkan jumlah suara yang mendukung. Inggris dan AS memveto rancangan usulan Rusia ini.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Judha Nugraha mengklarifikasi soal relawan WNI di RS Indonesia yang dikabarkan meninggal dunia di Gaza, di tengah konflik yang masih berlangsung antara Israel dan kelompok Hamas Palestina. Kabar mengenai relawan bernama Ahmad Hasyim yang gugur sebagai syahid beredar di media sosial dari akun Instagram @salimafillah milik Ustadz Salim A Fillah. "Sesuai data Kemenlu mengenai WNI di Gaza, tidak ada WNI dengan nama Ahmad Hasyim," ujar Judha.

Judha mengatakan, Kemenlu telah menghubungi Ustadz Salim A Fillah untuk melakukan pengecekan informasi dan mendapat penjelasan bahwa

relawan yang meninggal tersebut bukan WNI, melainkan warga lokal Palestina. Judha kemudian memastikan bahwa 10 WNI yang masih berada di Gaza, termasuk di antaranya tiga relawan di RS Indonesia, dalam kondisi selamat. "Seluruh 10 WNI di Gaza saat ini dalam kondisi selamat," tuturnya.

Sementara Juru Bicara Kemenlu RI Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan belasungkawa atas wafatnya warga Palestina Ahmad Hasyim, yakni relawan Gaza yang bekerja pada salah satu lembaga kemanusiaan Indonesia. "Kami ikut berduka cita dan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum," kata Iqbal.

Menu Retno Marsudi juga mengatakan, sejauh ini WNI yang belum dapat dievakuasi dari Gaza, dalam kondisi yang baik. "Alhamdulillah mereka dalam kondisi baik... baik dalam arti keadaan baik di tengah situasi yang sedang sangat tidak baik. Jadi alhamdulillah mereka sehat dan selamat," kata Retno. (Ant/San)-f

FB, IG dan WAAjukan Izin Social Commerce

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan, Facebook, Instagram, dan WhatsApp mengajukan izin sebagai social commerce, bukan e-commerce.

"Grup Meta itu kan Facebook, Instagram, WhatsApp itu memang sudah mengajukan untuk social commerce, jadi social commerce seperti adanya sekarang," ujar Isy saat berbincang dengan Antara di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (31/10).

Isy menjelaskan, ketiga platform tersebut hanya terdaftar sebagai portal web dan media sosial. Grup Meta pun belum mendapatkan perizinan sebagai social commerce. Kini, Grup Meta mengajukan perizinan sebagai social commerce, dimana platformnya hanya bertindak sebagai media promosi dan tidak melakukan transaksi.

"Sekarang dia kan mengajukan untuk social commerce, hanya untuk promosi, tidak ada transaksi. Ini sudah mengajukan tapi ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi," kata Isy.

Isy juga menyampaikan, untuk TikTok hingga saat ini belum mengajukan izin se-

bagai e-commerce. Ia juga menampik rumor bahwa platform tersebut akan kembali sebagai TikTok Shop pada November 2023. "TikTok sampai sekarang belum, ramainya kan teman-teman bilang TikTop Shop jadi e-commerce tapi itu belum, belum sama sekali. Enggak ada (peluncuran TikTok Shop)," ujarnya.

Isy menegaskan, platform apapun yang melakukan transaksi perdagangan di Indonesia harus memiliki izin sebagai e-commerce, sebab, perusahaan atau platform tersebut mencatatkan transaksi di Tanah Air sehingga harus memiliki PT dan NPWP. "Sekarang pengajuan selesai 3 atau 2 hari, karena sekarang online semua, sepanjang persyaratan dipenuhi. Kalau mau jadi e-commerce misalnya, dia harus punya entitas di dalam negeri, harus ada PT, NPWP karena dia meninggalkan transaksi, cari duit di kita," kata Isy.

Pemisahan antara e-commerce, social commerce, dan sosial media tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (Ant)-f

KOMISI A DPRD DIY KUNJUNGI JEJAK PENDIRI BANGSA

Keperntingan Negara Jauh di Atas Keluarga

JAKARTA (KR) - Komisi A DPRD DIY bersama wartawan unit dewan mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta, Selasa (31/10). Kegiatan ini dimaksudkan, untuk menyimak lebih jauh nilai-nilai pengorbanan para pendiri bangsa terhadap berdirinya Republik Indonesia. Salah satu dari nilai yang ditunjukkan adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan keluarga.

"Para pendiri bangsa menunjukkan nilai-nilai pengorbanan, tidak menempatkan kepentingan keluarga," ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto kepada wartawan di sela-sela peninjauan sejumlah ruangan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini terletak di Jalan Imam Bonjol



KR-Primaswolo S

Penyerahan cenderamata antara Komisi A DPRD DIY dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta.

Menteng Jakarta Pusat.

Komisi A bersama wartawan melaksanakan kunjungan dalam rangka program Sinau Pancasila sesuai amanat Perda No 1/2022 tentang Pancasila

dan Wawasan Kebangsaan. Eko Suwanto mengatakan berkomitmen penuh untuk mewujudkan semangat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya, gagasan

museum tokoh-tokoh bangsa yang berjuang dari Yogyakarta.

"Ketika kita belajar sejarah, kita tahu para pendiri bangsa mementingkan kepentingan bangsa di

atas kepentingan pribadi," ungkap Eko Suwanto yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara Plt Kepala Unit Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Harry Trisatya Wahyu, mengatakan, lokasi museum tersebut merupakan cikal bakal perumusan cita-cita bersama Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Rumah tersebut dahulu dimiliki Laksamana Takeshi Maeda yang digunakan beberapa jam oleh para tokoh untuk merumuskan naskah Proklamasi.

Laksamana Maeda merupakan kepala penghubung Angkatan Darat di masa itu. Di rumah milik Maeda ini, Soekarno, Mohammad Hatta dan Ahmad Soebarjo merumuskan naskah proklamasi. (Jon)-f

PENETAPAN STATUS ROCKY GERUNG Lemkapi Minta Polri Jangan Ragu

JAKARTA (KR) - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan meminta Polri tidak ragu menetapkan status hukum pengamat politik Rocky Gerung dalam perkara dugaan penyebaran kabar bohong. Kalau bukti-bukti cukup, Polri segera menentukan status Rocky Gerung.

"Yang penting penyidik bisa mempertanggungjawabkan secara hukum," kata Edi di Jakarta, Selasa (31/10).

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta itu menegaskan, tidak ada warga negara yang kebal terhadap hukum di Indonesia. "Negeri ini adalah negara hukum. Siapa saja yang terindikasi melanggar hukum, kalau terbukti harus diproses secara hukum. Jadi tidak ada yang kebal hukum," katanya.

Edi turut menyambut baik proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan penyebaran kebohongan yang diduga melibatkan Rocky Gerung. "Yang penting Polri dalam penanganannya harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Kinerja Bareskrim Polri pasti diperhatikan masyarakat," tandasnya.

Menurut Edi, Bareskrim Polri sejauh ini telah menangani kasus itu sesuai prosedur. Bahkan sudah meminta keterangan banyak pihak serta melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan kasus itu dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. "Itu artinya, penyidik dalam menangani kasusnya sudah menemukan ada unsur pidana di dalamnya," katanya. (Ant/Has)-f